

## Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Eka Setiajatnika<sup>1</sup>, Udin Hidayat<sup>2</sup>  
Universitas Koperasi Indonesia<sup>1,2</sup>  
[ekasetiajatnika@ikopin.ac.id](mailto:ekasetiajatnika@ikopin.ac.id)

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima 30 Mei 2025  
Disetujui 29 Juli 2025  
Diterbitkan 07 Agustus 2025

---

**Keywords:** SAK ETAP, SAK EP, Financial Reporting, Savings and Loan Cooperatives, Accounting Standards

---

### ABSTRACT

*This study aims to examine the differences between the implementation of the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) and the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) in the preparation of financial statements for Savings and Loan Cooperatives (KSP) in West Java, as well as to evaluate the cooperatives' readiness for transitioning to the new standard. Employing a comparative descriptive design with a mixed-methods approach, data were collected through in-depth interviews with cooperative management, internal accountants, and auditors, alongside document analysis of financial statements and applicable accounting standards. The findings reveal that the implementation of SAK ETAP still encounters significant challenges, particularly regarding limited human resources and underdeveloped accounting information systems, which compromise the quality of financial reporting. Meanwhile, readiness to adopt SAK EP remains low, due to its greater complexity and demand for enhanced technical competence. Nonetheless, the adoption of SAK EP is anticipated to improve the relevance, reliability, and transparency of cooperative financial reports. Therefore, strong support from the government and the Indonesian Institute of Accountants (IAI)—through training, dissemination, and technical assistance—is deemed essential. The study recommends strengthening human capital, improving information systems, and ensuring continuous external support to facilitate a successful transition to SAK EP. These findings are expected to serve as a reference for policymakers and cooperative practitioners aiming to enhance financial reporting quality in the cooperative sector.*

---

### PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan partisipasi aktif. Sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota, koperasi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota serta pemangku kepentingan lainnya. Sejak tahun 2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.

Namun, perkembangan regulasi dan kompleksitas kebutuhan pelaporan mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), yang mulai efektif diterapkan pada 1 Januari 2025 sebagai pengganti SAK ETAP. Perubahan ini menuntut koperasi untuk menyesuaikan diri dengan prinsip akuntansi yang lebih komprehensif dan kompleks.

Di lapangan, penerapan SAK ETAP pada koperasi masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan penelitian di koperasi aktif di Jawa Barat, sebagian besar koperasi masih menyusun laporan keuangan secara manual menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel, yang meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta menghambat akurasi dan ketepatan waktu pelaporan (Pratomo et al., 2021). Selain itu, keterbatasan sistem informasi akuntansi yang memadai dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi terkait prinsip dan ketentuan SAK ETAP menjadi hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar, terutama dalam penyajian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) (Rahayu, 2024).

Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM menyebabkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian format dan isi laporan keuangan, termasuk penggunaan istilah dan penyajian pos-pos laporan yang belum sesuai ketentuan standar. Selain itu, koperasi syariah di Jawa Barat juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan laporan keuangan syariah dengan ketentuan SAK ETAP, khususnya dalam penyajian laporan laba rugi dan pengungkapan informasi yang relevan (Suhendar, 2023).

Sebagai upaya memperbaiki kualitas pelaporan keuangan koperasi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi koperasi dalam menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Permenkop ini juga mengukuhkan legitimasi IAI sebagai penyusun standar akuntansi di Indonesia, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang wajib digunakan oleh koperasi simpan pinjam mulai tahun 2025. Peraturan ini juga mengatur ruang lingkup kebijakan akuntansi koperasi secara komprehensif dan mewajibkan audit laporan keuangan bagi koperasi dengan modal tertentu guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah koperasi aktif tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 1.854 KSP aktif (Data Dinas Koperasi Jawa Barat, 2023). Beberapa KSP di wilayah ini telah menjadi role model dalam pengelolaan keuangan berbasis standar akuntansi. Namun, transisi dari SAK ETAP ke SAK EP menuntut kesiapan koperasi dalam mengadopsi prinsip akuntansi yang lebih kompleks.

Penelitian ini difokuskan pada KSP terpilih di Jawa Barat yang aktif dan memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal, yaitu KSP Citra Mandiri Jawa Barat, Koperasi Simpan Pinjam Nusantara (KOPNUS), Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, dan KSPPS BTM An-nisa. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada kriteria aktivitas operasional yang konsisten, skala usaha menengah hingga besar dengan anggota lebih dari 500 orang, serta keterlibatan dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan konvensional.

Penelitian terdahulu banyak membahas penerapan SAK ETAP dan dampaknya terhadap laporan keuangan koperasi, namun studi komparatif mendalam antara SAK ETAP dan SAK EP masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan SAK ETAP dan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi serta mengidentifikasi implikasi perubahan standar terhadap kualitas laporan keuangan dan pengelolaan koperasi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP dan SAK EP, Mengidentifikasi implikasi perubahan standar akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap kualitas laporan keuangan koperasi, dan Menilai kesiapan koperasi dalam mengimplementasikan SAK EP sebagai standar akuntansi baru.

### **Teori Akuntansi Keuangan**

Teori akuntansi keuangan merupakan dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan informasi keuangan. Standar akuntansi berperan sebagai pedoman agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan konsisten sehingga dapat dibandingkan oleh para pemangku kepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994).

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

SAK ETAP adalah standar akuntansi yang dibuat khusus untuk entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan, termasuk koperasi di sektor riil. Standar ini menyediakan panduan penyusunan laporan keuangan yang sederhana namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)**

SAK EP merupakan standar yang menggantikan SAK ETAP mulai tahun 2025. Standar ini memiliki cakupan yang lebih luas dan pengaturan yang lebih rinci, termasuk perlakuan konsolidasi laporan keuangan, pengakuan investasi, imbalan kerja, dan pajak tangguhan. SAK EP dirancang untuk meningkatkan relevansi dan reliabilitas laporan keuangan entitas privat seperti koperasi (DSAK IAI, 2021).

### **Karakteristik Koperasi dalam Akuntansi**

Sebagai organisasi ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan, koperasi memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, standar akuntansi yang diterapkan harus mampu mencerminkan tujuan dan sifat koperasi agar laporan keuangan yang disusun dapat memberikan gambaran yang tepat dan relevan (PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian, 2010).

### **Laporan Keuangan Koperasi**

Berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), laporan keuangan koperasi diartikan sebagai penyajian yang terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan koperasi. Laporan ini terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (IAI, 2009).

Sementara itu, SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) memperluas lingkup dan detail laporan keuangan koperasi. Menurut SAK EP, laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan

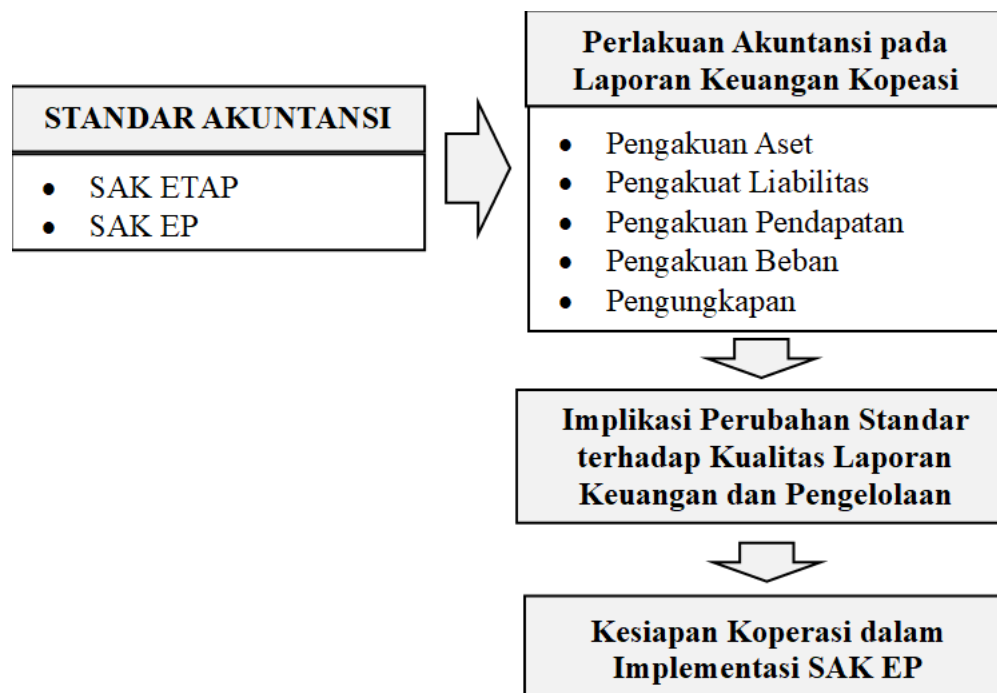
perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta laporan tambahan jika diwajibkan oleh standar tertentu (IAI, 2024). SAK EP menekankan pentingnya pengungkapan yang lebih mendalam dan detail, termasuk aspek pengakuan investasi, imbalan kerja, konsolidasi, dan pengukuran nilai wajar. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, andal, dan dapat diperbandingkan, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan anggota maupun pemangku kepentingan koperasi.

### **Teori Legitimasi dan Akuntabilitas**

Teori legitimasi menekankan bahwa organisasi harus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang sesuai standar, guna mempertahankan kepercayaan publik dan anggotanya (Sucher & Patten, 2007). Sedangkan teori akuntabilitas menggarisbawahi kewajiban organisasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kepada para pemangku kepentingan secara terbuka dan bertanggung jawab (Gray et al., 1995).

### **Kerangka Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji perbedaan perlakuan akuntansi antara SAK ETAP dan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Variabel yang dianalisis meliputi pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, beban, serta pengungkapan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi dampak perubahan standar terhadap kualitas laporan keuangan dan kesiapan koperasi dalam menerapkan standar baru melalui analisis kualitatif dan kuantitatif.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif komparatif dengan pendekatan metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif secara simultan. Pendekatan

ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Studi kasus komparatif diterapkan untuk mendalami perbedaan perlakuan akuntansi serta dampak penerapan kedua standar tersebut pada koperasi yang menjadi objek penelitian.

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah empat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) aktif di wilayah Jawa Barat, yakni:

1. KSP Citra Mandiri Jawa Barat;
2. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara (KOPNUS) Kabupaten Cianjur;
3. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, Bekasi;
4. KSPPS BTM An-nisa, Bogor.

Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria:

1. KSP memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Memiliki pengelolaan simpan pinjam yang kompleks;
3. Wilayah Jawa Barat dipilih karena jumlah koperasi aktif yang besar dan beragam;
4. Informan terdiri dari pengurus koperasi, akuntan internal, dan auditor yang berperan langsung dalam penyusunan dan pengawasan laporan keuangan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, akuntan internal, dan auditor yang terlibat langsung;
2. Data sekunder, berupa dokumen laporan keuangan koperasi tahun buku 2021–2024 serta dokumen standar akuntansi SAK ETAP dan SAK EP.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan meliputi:

1. diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, akuntan internal, dan auditor yang terlibat langsung
2. Data sekunder, berupa dokumen laporan keuangan koperasi tahun buku 2021–2024 serta dokumen standar akuntansi SAK ETAP dan SAK EP.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap:

1. Persiapan: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, akuntan internal, dan auditor yang terlibat langsung
2. Data sekunder, berupa dokumen laporan keuangan koperasi tahun buku 2021–2024 serta dokumen standar akuntansi SAK ETAP dan SAK EP.
3. Analisis Data:
  - a. Analisis komparatif dokumen laporan keuangan untuk mengidentifikasi perbedaan perlakuan akuntansi antara SAK ETAP dan SAK EP

- b. Analisis kualitatif hasil wawancara menggunakan teknik coding (open, axial, selective) untuk mengidentifikasi tema utama terkait penerapan standar
- c. Triangulasi data untuk mengintegrasikan temuan dari dokumen dan wawancara
- d. Analisis kuantitatif sederhana menggunakan rasio keuangan dan persepsi responden untuk menilai kualitas laporan keuangan.

### **Validitas dan Etika Penelitian**

Penelitian ini menerapkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking untuk memastikan keakuratan informasi. Aspek etika dipenuhi dengan memperoleh persetujuan tertulis dari responden, menjaga kerahasiaan data, dan melindungi identitas informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis**

#### **a. Analisis Komparatif Dokumen Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP dan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Barat**

##### **1) Struktur dan Penyajian Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EP) menghadirkan perubahan penting dalam terminologi dan format penyajian laporan keuangan jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Contohnya, istilah “neraca” yang digunakan dalam SAK ETAP diganti menjadi “laporan posisi keuangan” pada SAK EP. Selain itu, laporan laba rugi yang sebelumnya sederhana dikembangkan menjadi laporan penghasilan komprehensif yang mencakup unsur penghasilan komprehensif lain yang relevan bagi koperasi. SAK EP juga mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yang sebelumnya tidak diakomodasi oleh SAK ETAP. Hal ini sangat dibutuhkan bagi koperasi yang memiliki entitas anak atau asosiasi agar dapat menyajikan gambaran keuangan secara menyeluruh dan transparan. Namun, penerapan laporan konsolidasian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Jawa Barat masih terbatas karena sebagian besar koperasi belum memiliki entitas anak.

##### **2) Pengakuan dan Pengukuran Aset dan Liabilitas**

SAK EP memberikan opsi yang lebih luas dalam pengukuran aset, termasuk penggunaan model biaya atau nilai wajar untuk properti investasi, sementara SAK ETAP hanya mengizinkan penggunaan model biaya. Perbedaan mencolok juga terdapat pada pengakuan dan pengukuran penyisihan piutang tak tertagih. SAK EP menerapkan pendekatan berbasis risiko kredit melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, SAK ETAP hanya mengakui penyisihan saat pinjaman dinyatakan tidak tertagih menggunakan metode Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pendekatan yang diatur dalam SAK EP ini meningkatkan relevansi dan keadilan dalam pengakuan kerugian kredit pada laporan keuangan KSP.

##### **3) Pengakuan Pendapatan dan Beban**

SAK EP menetapkan aturan yang lebih detail dan sistematis dalam pengakuan pendapatan dan beban, termasuk pengakuan bunga pinjaman dengan metode efektif. Hal ini berbeda dengan SAK ETAP yang menggunakan metode akrual sederhana, sehingga memungkinkan penyajian

kinerja keuangan koperasi yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

#### 4) Pengungkapan dan Transparansi

SAK EP mewajibkan pengungkapan yang lebih lengkap dan terperinci, termasuk catatan atas laporan keuangan (CALK), kebijakan akuntansi yang diterapkan, estimasi akuntansi, serta koreksi kesalahan yang terjadi selama periode pelaporan. Persyaratan ini belum diatur secara mendalam dalam SAK ETAP. Di KSP wilayah Jawa Barat, pengungkapan CALK masih terbatas, sehingga penerapan SAK EP diharapkan dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan koperasi.

#### 5) Dampak terhadap Kualitas Laporan Keuangan KSP

Peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP berpotensi memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan KSP. Dengan kerangka pelaporan yang lebih komprehensif dan detail, laporan keuangan menjadi lebih relevan, dapat dipercaya, dan mudah dibandingkan baik antar periode maupun antar entitas. Namun, penerapan SAK EP juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan sistem informasi akuntansi di koperasi agar dapat memenuhi persyaratan standar yang baru.

Analisis komparatif dokumen laporan keuangan pada KSP di Jawa Barat menunjukkan bahwa SAK EP menawarkan kerangka pelaporan yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini dibandingkan SAK ETAP. Perbedaan utama terletak pada struktur laporan, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, pengakuan pendapatan dan beban, serta tingkat pengungkapan informasi. Implementasi SAK EP diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu laporan keuangan koperasi simpan pinjam secara signifikan.

#### b. Hasil Analisis Wawancara Menggunakan Teknik Coding

Analisis dilakukan terhadap transkrip wawancara mendalam yang melibatkan pengurus, akuntan internal, dan auditor KSP di Jawa Barat. Proses ini mengikuti tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* sesuai pendekatan *grounded theory*.

##### 1) Open Coding

Pada tahap *open coding*, peneliti mengidentifikasi dan memberi label pada bagian-bagian transkrip yang relevan. Temuan utama meliputi:

- a) Pemahaman SAK ETAP: Sebagian besar pengurus dan akuntan internal memahami SAK ETAP dengan baik, namun implementasinya belum optimal, terutama pada aspek laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- b) Kesiapan Adopsi SAK EP: Kesiapan koperasi masih rendah, dengan banyak pengurus yang belum memahami ketentuan baru seperti pengakuan investasi dan konsolidasi laporan keuangan.
- c) Keterbatasan SDM Akuntansi: Keterbatasan tenaga profesional di bidang akuntansi menjadi hambatan utama penerapan standar secara maksimal.
- d) Kebutuhan Pelatihan: Terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap pelatihan dan pendampingan, khususnya terkait SAK EP.
- e) Transparansi dan Akuntabilitas: SAK EP dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan koperasi.

- f) Tantangan Implementasi: Kompleksitas standar, keterbatasan SDM, serta biaya pengembangan sistem menjadi tantangan utama.
- g) Sistem Informasi Akuntansi: Sebagian besar KSP masih mengandalkan pencatatan manual atau perangkat lunak sederhana yang belum mendukung SAK EP secara optimal.
- h) Manfaat SAK EP: Dirasakan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
- i) Dukungan Eksternal: Dukungan dari pemerintah dan IAI sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, serta penyediaan perangkat lunak akuntansi.

## 2) Axial Coding

Pada tahap axial coding, kode-kode tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori utama:

- a) Kompetensi dan Kesiapan Internal: Keberhasilan adopsi SAK EP sangat bergantung pada kompetensi SDM dan kesiapan internal koperasi, di mana keterbatasan pengetahuan dan akses pelatihan menjadi hambatan utama.
- b) Persepsi dan Tantangan Implementasi: Responden menilai SAK EP positif karena meningkatkan transparansi, namun juga mengkhawatirkan kompleksitas dan biaya adaptasi.
- c) Dukungan Eksternal: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan IAI, baik berupa pelatihan maupun perangkat lunak, sangat penting untuk memperlancar proses transisi standar.

## 3) Selective Coding

Analisis menyimpulkan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada KSP di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh:

- a) Kompetensi SDM akuntansi,
- b) Persepsi dan kesiapan menghadapi tantangan implementasi,
- c) Dukungan eksternal dari pemerintah dan IAI.

Transisi ke SAK EP memberikan peluang peningkatan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada peningkatan kompetensi SDM, penyesuaian sistem informasi, serta dukungan eksternal yang terstruktur dan berkelanjutan.

### c. Hasil Triangulasi Data untuk Validitas Penelitian

Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi data, yakni dengan mengintegrasikan hasil analisis dokumen laporan keuangan, wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, akuntan internal, dan auditor, serta observasi langsung terhadap proses pencatatan keuangan. Ringkasan hasil triangulasi disajikan sebagai berikut:

- 1) **Analisis Dokumen:** Pemeriksaan dokumen laporan keuangan koperasi mengonfirmasi adanya variasi dalam penerapan SAK ETAP dan kesiapan menuju SAK EP. Beberapa koperasi telah menyusun laporan keuangan sesuai standar, namun masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek tertentu, seperti laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- 2) **Wawancara Mendalam:** Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus dan akuntan internal memahami SAK ETAP dengan baik, tetapi masih menghadapi kendala dalam adopsi SAK EP, terutama terkait pemahaman atas ketentuan baru dan keterbatasan sumber

daya manusia di bidang akuntansi. Kebutuhan pelatihan dan pendampingan intensif sangat dirasakan untuk mendukung proses transisi standar.

- 3) **Observasi Lapangan:** Observasi proses pencatatan keuangan di koperasi mengungkapkan bahwa sebagian besar KSP masih menggunakan sistem manual atau perangkat lunak sederhana, sehingga belum optimal dalam mendukung penerapan standar akuntansi yang lebih kompleks. Hal ini juga memperkuat temuan wawancara terkait perlunya pengembangan sistem informasi akuntansi yang lebih memadai.

Secara keseluruhan, triangulasi data ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAK EP sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM, kesiapan sistem informasi, serta dukungan eksternal dari pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia. Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk memastikan proses adaptasi standar akuntansi berjalan efektif dan berkelanjutan.

#### d. Analisis Kuantitatif Mengukur Kualitas Laporan Keuangan

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menilai kualitas laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Jawa Barat sebelum dan setelah (simulasi) penerapan SAK EP. Pengukuran kualitas laporan keuangan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu relevansi, reliabilitas, dan keterbandingan, dengan menggunakan rasio keuangan serta skala Likert.

- 1) **Relevansi:** Aspek relevansi dievaluasi melalui rasio profitabilitas, yakni Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Kedua rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki.
- 2) **Reliabilitas:** Reliabilitas laporan keuangan diukur menggunakan rasio solvabilitas, yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). Rasio-rasio ini merefleksikan sejauh mana koperasi mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Berikut adalah hasil analisis kuantitatif sederhana pada salah satu KSP di Jawa Barat:

**Tabel 1. Hasil Analisis Kuantitatif pada Salah Satu KSP di Jawa Barat**

Rasio/Pernyataan	SAK ETAP	SAK EP (Simulasi)	Perubahan
ROA	5%	7%	Meningkat
ROE	10%	14%	Meningkat
DAR	80%	50%	Menurun
DER	120%	100%	Menurun
Keterbandingan (Rata-rata Skala Likert)	3	4	Meningkat

*Sumber: Hasil pengolahan data*

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SAK EP (simulasi) berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan KSP di Jawa Barat. Peningkatan ROA dan ROE menunjukkan bahwa laporan keuangan menjadi lebih relevan karena koperasi mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi. Penurunan DAR dan DER menunjukkan bahwa laporan keuangan menjadi lebih reliabel karena tingkat solvabilitas koperasi meningkat. Peningkatan skor keterbandingan menunjukkan bahwa laporan keuangan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan koperasi lain dan periode sebelumnya.

## Pembahasan

### a. Penerapan SAK ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Barat

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi SAK ETAP di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Jawa Barat masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur sistem informasi akuntansi yang belum memadai. Temuan ini konsisten dengan laporan Pratomo et al. (2021) dan Rahayu (2024), yang menyebutkan bahwa sebagian besar koperasi masih menerapkan pencatatan manual dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan SAK ETAP, khususnya dalam aspek penyusunan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya kualitas laporan keuangan koperasi, sehingga menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas kepada anggota maupun pemangku kepentingan lainnya.

### b. Kesiapan dan Tantangan dalam Implementasi SAK EP

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun koperasi telah memahami manfaat serta keunggulan SAK EP dalam meningkatkan mutu pelaporan keuangan, kesiapan mereka untuk mengadopsi standar baru ini masih terbatas. Kompleksitas regulasi dalam SAK EP—seperti pengakuan investasi, imbalan kerja, dan konsolidasi laporan keuangan—merupakan hambatan utama, terutama bagi koperasi yang belum memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi akuntansi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis DSAK IAI (2021) dan DDTTC News (2024) yang menegaskan perlunya pelatihan dan pendampingan intensif guna mendukung proses transisi menuju SAK EP.

### c. Implikasi Penerapan SAK EP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Implementasi SAK EP berpotensi memperbaiki aspek relevansi, reliabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan koperasi. Standar ini mensyaratkan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci, sehingga dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas koperasi. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan akuntabilitas, yang menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang transparan untuk menjaga kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan (Sucher & Patten, 2007; Gray et al., 1995). Namun demikian, efektivitas penerapan SAK EP sangat ditentukan oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan sistem informasi akuntansi yang memadai.

### d. Peran Dukungan Eksternal dalam Proses Transisi Standar Akuntansi

Kontribusi pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sangat vital dalam mempercepat proses adaptasi koperasi terhadap penerapan SAK EP. Kebutuhan utama koperasi, sebagaimana diidentifikasi melalui wawancara, meliputi pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan teknis yang berkesinambungan. Keterlibatan aktif pemerintah dan organisasi profesi ini sejalan dengan fungsi regulasi dan lembaga pendukung yang bertujuan memperkuat tata kelola koperasi (Permenkop No. 2 Tahun 2024).

### e. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada lingkup sampel yang hanya mencakup beberapa KSP di wilayah Jawa Barat, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasi secara luas. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar cakupan geografis diperluas dan digunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak penerapan SAK EP terhadap kinerja keuangan serta tata kelola koperasi secara lebih menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa implementasi SAK ETAP pada KSP di Jawa Barat masih membutuhkan perbaikan, sementara transisi ke SAK EP memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi. Namun demikian, kompleksitas tantangan implementasi memerlukan dukungan intensif, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi. Dengan adanya dukungan yang memadai, koperasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota, sehingga mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penerapan SAK ETAP

Implementasi SAK ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Jawa Barat masih belum berjalan secara optimal. Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang masih sederhana atau manual. Kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang belum memadai, khususnya terkait kelengkapan dan transparansi.

2. Kesiapan Adopsi SAK EP

Kesiapan koperasi untuk mengadopsi SAK EP masih rendah, meskipun terdapat pemahaman mengenai manfaat standar baru ini dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kompleksitas pengaturan SAK EP, seperti pengakuan investasi, imbalan kerja, dan konsolidasi laporan keuangan, menjadi tantangan utama bagi koperasi.

3. Dampak Positif SAK EP

Penerapan SAK EP berpotensi besar untuk meningkatkan relevansi, reliabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan koperasi. Dengan demikian, standar ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada anggota serta pemangku kepentingan lainnya.

4. Pentingnya Dukungan Eksternal

Dukungan dari pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sangat penting untuk mempercepat proses transisi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pengembangan sistem informasi akuntansi di koperasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Akuntansi Koperasi

Koperasi disarankan untuk secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus serta akuntan internal agar mampu memahami dan mengimplementasikan SAK EP secara efektif. Pemerintah dan IAI diharapkan dapat berperan aktif dalam menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi.

2. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi

Koperasi perlu mengadopsi atau mengembangkan sistem informasi akuntansi yang mendukung penerapan SAK EP, sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.

### 3. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi SAK EP

Pemerintah dan organisasi profesi perlu memperkuat upaya sosialisasi serta memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan terkait SAK EP, khususnya bagi koperasi yang masih memiliki keterbatasan sumber daya dan akses informasi.

### 4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak penerapan SAK EP terhadap kinerja keuangan serta tata kelola koperasi secara lebih komprehensif.

## BIBLIOGRAFI

- Ardi, M. N., Hanny, H. N., & Podi, S. (2024). Implementasi standar akuntansi koperasi simpan pinjam sesuai Permen KUKM No. 13 Tahun 2015: Studi kasus Koperasi Mitra Usaha Desa Cisempur. *Jurnal Aliansi*, 12(1), 45–58.
- Dewi, S., Nugroho, A., & Santoso, B. (2017). Pengaruh pemahaman standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 123–134.
- DSAK IAI. (2021). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fatihudin. (2015). Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik. Alfabeta.
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1995). *Corporate social reporting: Accounting and accountability*. Prentice Hall.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1994). Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2024 tentang penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat pada koperasi. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Pratomo, T. A., Santoso, R., & Wijaya, F. (2021). Penerapan SAK ETAP pada koperasi aktif di Jawa Barat. *Jurnal Coopetition*, 5(3), 78–89.
- Rahayu, D. (2024). Analisis kesiapan koperasi simpan pinjam dalam mengadopsi SAK EP di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 101–115.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta.
- Sucher, S. J., & Patten, D. M. (2007). The impact of legitimacy on corporate social responsibility reporting. *Journal of Business Ethics*, 72(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9164-7>
- DDTC News. (2024). SAK ETAP diganti SAK EP: Kebijakan baru akuntansi koperasi dirilis. <https://ddtc.co.id>
- Universitas Indonesia. (2023). Literasi akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi simpan pinjam di Depok [Laporan penelitian]. Universitas Indonesia.